

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

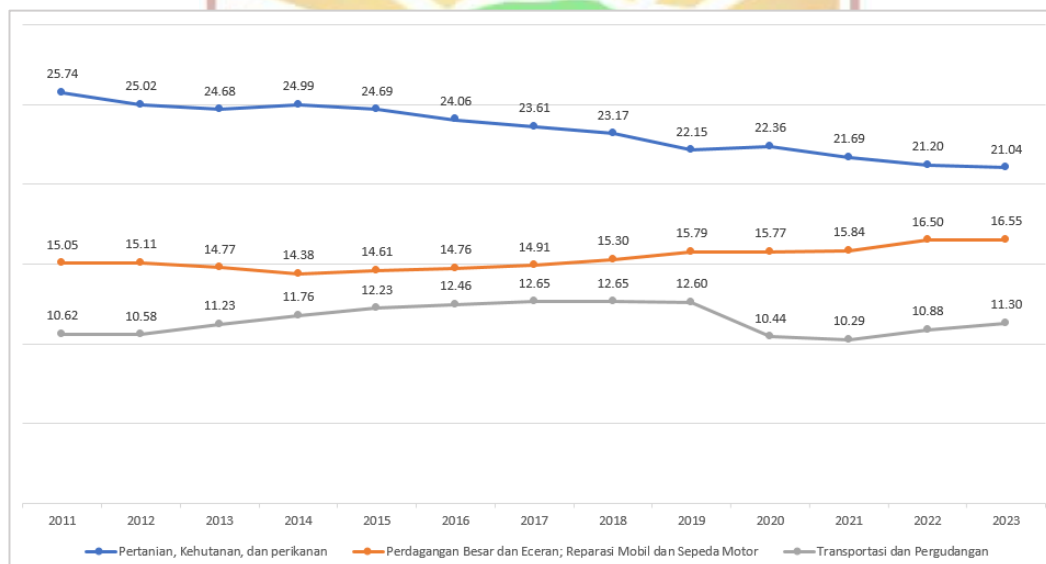
Sebagai negara agraris, pertanian menjadi salah satu sektor utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan dalam sektor pertanian dapat mewujudkan keberhasilan ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, perkembangan sosial budaya, keamanan dan stabilitas di Indonesia. Ketergantungan masyarakat yang tinggi pada sektor pertanian sehingga menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Keterbukaan lapangan pekerjaan di sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja tanpa penyaringan menjadi nilai tambah tersendiri bagi calon petani. Pertanian menjadi sumber pendapatan pokok bagi petani dan keluarga, sehingga kesejahteraan para petani perlu diperhatikan dalam pembangunan pertanian. Peran pertanian yang sangat penting bagi kesinambungan hidup manusia sehingga selalu diperlukan sistem pembangunan yang terencana secara sistematis dari waktu ke waktu (BPS, 2023).

Pelaksanaan pembangunan pertanian yang sudah berjalan, banyak keberhasilan yang telah dicapai dalam peningkatan produksi, perekonomian nasional perdesaan dan perkotaan. Tetapi masalah kemiskinan masih juga belum terpecahkan, terutama masalah kemiskinan di pedesaan. Menurut sensus pertanian pada tahun 2023, permasalahan dalam pembangunan pertanian dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, perubahan iklim global, lebih banyak usaha tani skala kecil, serta skala kehilangan hasil panen dan pemborosan pangan yang masih tinggi. Permasalahan lainnya yaitu terkait dengan rendahnya tingkat kepemilikan lahan usaha tani. Permasalahan dan tantangan dalam sektor pertanian yang dihadapi oleh petani secara umum semakin kompleks (BPS, 2023).

Kesejahteraan petani termasuk dari visi dan misi pembangunan pertanian dalam upaya mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan tujuan pembangunan pertanian untuk perbaikan kesejahteraan petani, dibutuhkan alat ukur untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani yaitu Nilai Tukar Petani (NTP). Penanda kesejahteraan yang unik bagi praktis rumah tangga tani tidak ada, sehingga NTP menjadi satu-satunya pilihan

bagi pengamat pembangunan pertanian untuk menilai tingkat kesejahteraan petani (Simatupang dan Maulana, 2008).

Potensi sektor pertanian yang melimpah di Provinsi Sumatera Barat dapat digunakan untuk memajukan perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat mempunyai keragaman komoditas dalam pertanian terutama pada komoditas unggulan seperti padi, jagung, karet, kelapa sawit, kopi, kayu manis, kakao, gambir, dan tanaman hortikultura. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa pertanian memberi kontribusi yang sangat signifikan. Sektor pertanian sejak tahun 2010 hingga 2023 menjadi salah satu dari lima lapangan usaha yang secara konsisten menyokong lebih dari 20% PDRB Provinsi Sumatera Barat (BPS, 2023).



Gambar 1. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2011–2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan Gambar 1. sektor pertanian menempati tiga besar sebagai kontributor perekonomian Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2010. Peran besar dari sektor pertanian ini menunjukkan pentingnya pembangunan dan mengoptimalkan sumber daya pertanian untuk mendukung percepatan dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Nilai yang diberikan sektor pertanian pada tahun 2023 tercatat sedikitnya mencapai Rp 41,61 triliun atau setara dengan 21,78% total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan andil sebesar ini, pertanian memegang peran penting dalam struktur perekonomian Provinsi

Sumatera Barat. Dalam struktur perekonomian nasional, pertanian tetap menjadi lapangan usaha yang penting, walaupun kontribusi yang diberikan terus menurun tetapi belum tergeser oleh lapangan usaha lain.

Berdasarkan hasil survei dari sensus pertanian pada tahun 2023, rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Sumatera Barat tercatat sebanyak 724.515 rumah tangga atau mengalami peningkatan sebanyak 12,03% dari tahun 2013 yang tercatat sebanyak 644.610 rumah tangga (Lampiran 1). Sektor pertanian menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Kontribusi dari sektor ini tidak hanya dalam penyediaan pangan, tetapi juga dalam menyerap tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sensus Pertanian tahun 2023, juga menunjukkan luas lahan yang dikuasai oleh Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) di Provinsi Sumatera Barat rata-rata sebesar 0,81 Ha, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu sebesar 0,69 Ha. Dan untuk kepemilikan lahan pertanian di Provinsi Sumatera Barat yaitu terdapat 53,81% kepemilikan lahan pertanian oleh ART perempuan dan 46,19% kepemilikan lahan pertanian oleh laki-laki, baik ada maupun tidak ada bukti kepemilikan.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan konsep yang dikembangkan oleh BPS sebagai alat ukur yang digunakan untuk melihat perbandingan relatif kesejahteraan petani. Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari kemampuan daya beli petani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani. Semakin tinggi daya beli petani terhadap kebutuhan konsumsi, maka semakin tinggi Nilai Tukar Petani (NTP) yang berarti petani relatif lebih sejahtera. Hubungan antara Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata yang terlihat pada posisi indeks harga yang diterima petani (It) yang berada pada pembilang dari angka nilai tukar petani. Pada kenyataannya perubahan nilai tukar petani (NTP) lebih merugikan daripada menguntungkan bagi petani, karena dalam usaha tani, pendapatan yang diterima petani lebih kecil daripada biaya produksi atau perubahan rasio pendapatan di sektor pertanian terhadap pendapatan di sektor non pertanian lebih sering negatif daripada positif, sebab itu NTP menjadi punya korelasi dengan kemiskinan. Dengan rendahnya nilai NTP ini juga dapat mengindikasikan bahwa masih banyak kemiskinan yang berada di pedesaan. Nilai NTP harus sebanding dengan daya beli petani terhadap kebutuhan konsumsi dan produksi. Ketika

pendapatan dan produksi pertanian meningkat, belum tentu kesejahteraan petani meningkat jika daya beli petani tidak meningkat (Asriyah et al. 2021).

Secara menyeluruh tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari fluktuasi jumlah pengeluaran petani untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ataupun untuk *input* produksi, sehingga penting untuk melihat tingkat daya beli petani. Petani yang menjadi produsen sekaligus konsumen dalam menentukan pilihan ketika mengalokasikan pendapatannya, pertama untuk memenuhi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup petani dan juga keluarganya, kedua, pengeluaran untuk usaha tani yang meliputi biaya operasional produksi dan investasi usaha tani. Untuk poin kedua dapat dilaksanakan ketika kebutuhan pokok petani sudah dipenuhi, karena itu investasi dan pembentukan barang modal menjadi faktor penentu pada tingkat kesejahteraan petani. Sehingga memerlukan perhatian lebih karena kesejahteraan petani berkaitan dengan masa depan usaha tani padi atau pangan lainnya dalam berkelanjutan produksi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia (Aulia et al. 2021).

Berdasarkan konsep BPS, NTP untuk mengukur daya tukar barang/produk pertanian yang dihasilkan petani yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga petani dan *input* produksi pertanian. Indikator NTP yang dapat digunakan mengukur tingkat daya beli petani ini membandingkan indeks harga yang diterima petani (I_t) dengan indeks harga yang dibayar petani (I_b). Indeks harga yang diterima petani (I_t) memperlihatkan perkembangan harga produk pertanian yang dijual petani secara berkala. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani (I_b) memperlihatkan perkembangan harga yang dikeluarkan oleh petani untuk konsumsi rumah tangga petani sehari-hari dan perkembangan harga yang dikeluarkan oleh petani untuk biaya produksi produk pertanian.

Indeks harga yang diterima petani (I_t) merupakan rata-rata harga dari hasil produksi petani yang belum ditambahkan dengan biaya transportasi (pengangkutan) dan biaya pengemasan ke dalam harga jualnya yang disebut *farm gate* (harga di sawah atau ladang setelah pemetikan). Sedangkan indeks harga yang dibayar petani (I_b) merupakan rata-rata harga barang atau jasa yang dibeli petani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan keperluan biaya produksi pertanian. NTP memperlihatkan secara umum bagaimana daya beli produk pertanian terhadap

barang atau jasa yang dibeli petani untuk kebutuhan rumah tangganya maupun untuk biaya produksi pertanian selanjutnya (BPS, 2023).

Potensi pertanian yang berlimpah di Provinsi Sumatera Barat bisa dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Data menunjukkan bahwa pertanian memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan data tahun 2010-2023 dari Badan Pusat Statistika bahwa pertanian menjadi salah satu dari lima lapangan usaha yang konsisten menyumbang lebih dari 20% untuk PDRB Provinsi Sumatera Barat. Peran besar dari sektor pertanian menunjukkan pentingnya pengembangan dan mengoptimalkan sumber daya pertanian untuk mendukung akselerasi Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat (Lampiran 4).

Perekonomian daerah yang terus tumbuh, dapat dilihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya, merupakan tolak ukur penting bagi kemajuan wilayah. Kenaikan PDRB ini tidak hanya menandakan kemajuan ekonomi yang signifikan, tapi juga berakibat langsung pada peningkatan pendapatan daerah. Idealnya peningkatan pendapatan daerah ini akan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian yang sering menjadi penopang utama ekonomi daerah, Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi tolak ukur yang relevan. Oleh karena itu maka diperlukan penelitian lebih lanjut agar dapat melihat tingkat kesejahteraan petani.

B. Rumusan Masalah

Ketergantungan masyarakat yang tinggi pada sektor pertanian sehingga menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Pertanian menjadi sumber pendapatan pokok bagi petani dan keluarga, sehingga kesejahteraan para petani perlu diperhatikan dalam pembangunan pertanian. Sehingga diperlukan suatu indikator yang bisa secara akurat mengukur kemampuan daya beli petani sebagai pelaku utama dalam sektor pertanian. Salah satu pendekatan untuk mengukur indikator tingkat daya beli petani yaitu Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang harus dibayar petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani (It) merupakan indeks yang menggambarkan fluktuasi harga produk yang dihasilkan oleh petani. Indeks ini

digunakan sebagai penunjang dalam perhitungan data pendapatan sektor pertanian. Sedangkan indeks harga yang harus dibayar petani (I_b) merupakan indeks yang mencerminkan fluktuasi biaya konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk pertanian. Perkembangan tingkat inflasi di pedesaan dapat digambarkan dengan perkembangan tingkat indeks harga yang dibayar petani (I_b).

Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya menggunakan data primer dalam menghitung Indeks harga yang diterima petani (I_t), namun Badan Pusat Statistik (BPS) juga menggunakan data sekunder dalam mengolah datanya, yang menggunakan perhitungan diagram timbang untuk menghitung nilai produksi hasil pertanian yang dijual petani dari masing-masing jenis produk pertanian. Dibutuhkan tiga macam data untuk perhitungan ini, yaitu:

1. Kuantitas produksi tiap jenis tanaman yang didapatkan dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan BPS; dan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan BPS.
2. Harga produsen yang didapatkan dari hasil pencacahan lapangan yang menggunakan daftar HD-1, HD-2, HD-3, HD-4, HD-5.1, HD-5.2, dan HD-6 (Lampiran 2).
3. Persentase barang yang dijual (*Marketed Surplus*) merupakan perbandingan antara nilai produksi yang dijual petani dengan nilai produksinya untuk masing-masing jenis tanaman pertanian.

Pengklasifikasian indeks juga dilakukan untuk indeks harga yang diterima petani (I_t) yang meliputi berbagai jenis komoditas dari sektor pertanian, yang terbagi menjadi lima subsektor yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan. Dalam perhitungan indeks harga yang diterima petani (I_t) pada subsektor tanaman pangan ada dua komoditi yang masuk perhitungan yang meliputi padi dan palawija. Lalu pada subsektor tanaman hortikultura ada tiga jenis komoditi yang masuk dalam perhitungan yang meliputi tanaman buah-buahan, sayur-sayuran dan obat-obatan. Selanjutnya pada subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) dalam perhitungannya yaitu kelompok tanaman perkebunan, seperti tanaman kelapa, kopi robusta, tebu, cengkeh, dan tembakau. Selanjutnya pada subsektor peternakan ada empat jenis kelompok yang masuk

dalam perhitungan yang meliputi ternak besar (sapi dan kerbau), ternak kecil (domba, kambing, babi dan lainnya), unggas (ayam, itik dan lainnya), hasil ternak (telur, susu sapi dan lainnya). Sedangkan pada subsektor perikanan memiliki dua jenis kelompok yang masuk dalam perhitungan yang meliputi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengolah datanya menggunakan perhitungan diagram timbang yang meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, biaya (produksi, upah, dan lainnya), dan penambahan barang modal. Data yang digunakan untuk perhitungan data konsumsi rumah tangga didapatkan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), data biaya (produksi, upah, dan lainnya) didapatkan dari hasil pengolahan Survei Struktur Ongkos Pertanian, selanjutnya data penambahan barang modal didapatkan dari Survei Khusus Pendapatan Nasional dan Tabel Input-Output berupa persentase dari penambahan barang modal berupa cangkul, parang, linggis, arit, dan lainnya dari masing-masing jenis tanaman. Sedangkan untuk pengklasifikasian indeks untuk indeks harga yang dibayar petani (Ib) menggunakan dua data yaitu, pertama, Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) mencakup indeks kelompok bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transportasi dan komunikasi. Kedua, Indeks Harga Produksi dan Barang Modal (BPPBM) meliputi indeks kelompok bibit; pupuk, obat-obatan, dan pakan; biaya sewa dan pengeluaran lain; transportasi; barang modal; dan upah buruh (BPS, 2023).

Keberhasilan pembangunan dalam sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya para petani. Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat daya beli petani salah satunya adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai pendekatan yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari rasio antara nilai indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). Jika harga produk pertanian naik, dengan anggapan jumlah produksi tidak berkurang, maka nilai penerimaan atau pendapatan petani

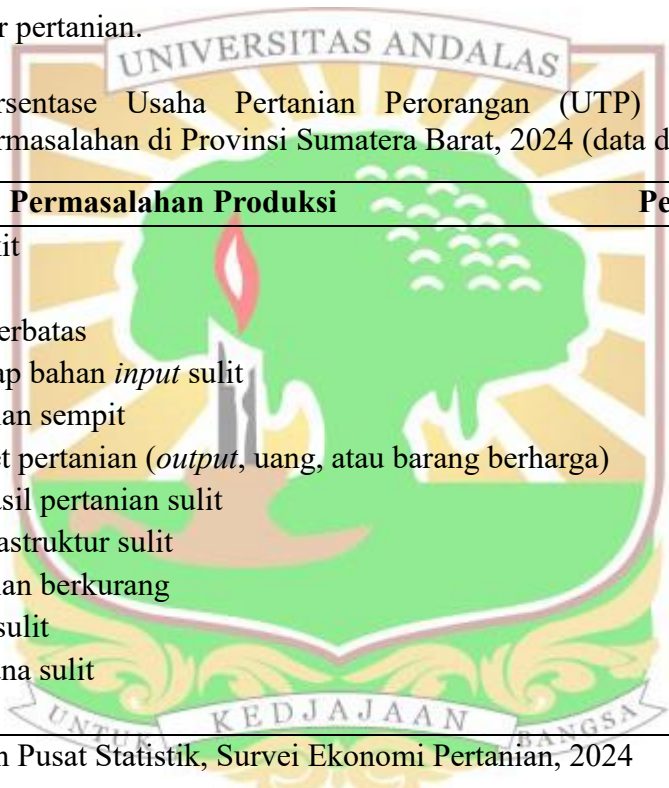
dari hasil panen juga akan bertambah. Perkembangan rasio indeks harga yang diterima petani (It) yang lebih tinggi dari indeks harga yang dibayar petani (Ib), maka petani memiliki pendapatan yang lebih besar dari pengeluarannya sehingga petani mampu memenuhi pengeluaran rumah tangga dan biaya produksi dengan pendapatannya. Dengan demikian terjadinya pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung ini menandakan keberhasilan dari pembangunan sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat (BPS, 2023).

Nilai Tukar Petani (NTP) memperlihatkan daya tukar atau daya beli petani terhadap produk yang dibeli atau dibayar petani, mencakup konsumsi rumah tangga dan *input* produksi. Dapat dikatakan semakin tinggi nilai tukar petani, maka daya beli petani meningkat dan berarti kesejahteraan petani meningkat. Bagi pengamat hasil pembangunan pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi pilihan satu-satunya indikator untuk penanda tingkat kesejahteraan petani. Pemahaman mendalam terkait perilaku nilai tukar petani seperti dampak pembangunan serta faktor-faktor yang menentukan nilai tukar petani akan lebih efektif untuk perencanaan kebijakan pembangunan, dan memperbaiki program-program pembangunan serta distribusi anggaran yang lebih memihak merupakan upaya dalam peningkatan kesejahteraan petani. Umumnya Nilai Tukar Petani (NTP) memiliki karakteristik yang cenderung menurun. Hal tersebut berkaitan dengan karakteristik dari produk pertanian dan non pertanian, yaitu (1) Elastisitas pendapatan dari produk pertanian bersifat inelastis, sedangkan produk non pertanian cenderung bersifat lebih elastis, (2) Perubahan teknologi dengan laju yang berbeda menguntungkan produk manufaktur, dan (3) Perbedaan pada struktur pasar, dimana produk pertanian biasanya lebih kompetitif dibandingkan produk manufaktur yang biasanya kurang kompetitif dan mengarah ke pasar monopoli atau oligopoli (Rachmat, 2013).

Perhitungan NTP di Provinsi Sumatera Barat, kabupaten yang dicakup dalam perhitungan NTP di Provinsi Sumatera Barat meliputi 11 kabupaten, yaitu Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Sijunjung, Dharmasraya, Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, dan Pasaman Barat. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi indikator yang penting bagi daerah yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor utama pendapatan daerahnya. Maka

dari itu sebagai salah satu wilayah dengan penyerap tenaga kerja paling banyak dalam sektor pertanian pemerintahan Provinsi Sumatera Barat setiap tahun melakukan perhitungan indeks tersebut. Lapangan pekerjaan sektor pertanian menyerap tenaga kerja sebesar 33,90% pada tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat. Sektor pertanian menjadi lapangan pekerjaan utama yang banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh BPS pada tahun 2023 (Lampiran 3). Dengan menghitung dan memahami pentingnya Nilai Tukar Petani (NTP) untuk melihat perkembangan tingkat daya beli petani di Provinsi Sumatera Barat diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap sektor pertanian.

Tabel 1. Persentase Usaha Pertanian Perorangan (UTP) menurut Jenis Permasalahan di Provinsi Sumatera Barat, 2024 (data diolah)



Jenis Permasalahan Produksi	Persentase UTP
Hama penyakit	62,39
Faktor alam	38,51
Modal kecil/terbatas	34,73
Akses terhadap bahan <i>input</i> sulit	30,34
Lahan pertanian sempit	13,43
Pencurian aset pertanian (<i>output</i> , uang, atau barang berharga)	7,35
Pemasaran hasil pertanian sulit	7,27
Akses ke infrastruktur sulit	6,91
Lahan pertanian berkurang	5,95
Akses kredit sulit	3,52
Akses ke sarana sulit	2,85
Lainnya	3,09

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Ekonomi Pertanian, 2024

Tantangan yang sangat penting bagi Usaha Pertanian Perorangan (UTP) di Provinsi Sumatera Barat yaitu permasalahan pada produksi pertanian. Pada tabel 1 menunjukkan kalau hama penyakit menjadi masalah utama yang dihadapi petani dengan nilai sebesar 62,39%. Serta faktor alam juga berkontribusi besar terhadap kesulitan produksi dengan nilai sebesar 38,51%. Tingginya nilai pada kedua kategori ini menandakan kerentanan sektor pertanian terhadap kondisi lingkungan dan serangan organisme pengganggu tanaman. Di sisi lain, modal kecil/terbatas juga menjadi kendala finansial utama dengan nilai sebesar 34,73%. Tidak hanya kekurangan biaya tetapi juga mengalami kendala dalam akses terhadap bahan *input*

yang sulit dengan nilai 30,34%. Walaupun kendala terhadap lahan pertanian yang sempit sebesar 13,43% dan lahan pertanian berkurang sebesar 5,95% juga menjadi isu, tantangan terkait modal dan akses *input* yang sulit jauh lebih mendominasi. Permasalahan lainnya seperti pemasaran hasil pertanian yang sulit sebesar 7,27%, pencurian aset pertanian sebesar 7,35%, juga berbagai kesulitan terkait akses terhadap infrastruktur, sarana, dan kredit dengan persentase yang lebih rendah.

Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023 yaitu sebesar 110,28 atau turun 0,08% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 110,37. Rata-rata indeks harga yang diterima petani (It) tahun 2023 yaitu sebesar 130,36 atau naik 3,93% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 125,43. Sedangkan rata-rata indeks yang dibayarkan petani selama tahun 2023 sebesar 118,20 atau naik 4,00% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 113,65. Berdasarkan rata-rata nilai indeks harga diterima petani (It) dan indeks harga dibayar petani (Ib) pada periode 2022 dan 2023 di Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan peningkatan pada nilai indeks harga diterima petani (It) dan indeks harga dibayar petani (Ib). Rata-rata kenaikan nilai indeks harga diterima petani (It) yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kenaikan nilai indeks harga dibayar petani (Ib) yang membuat NTP mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan petani tidak dapat mengimbangkan kenaikan dari harga kebutuhan petani untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi serta penambahan barang modal.

Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor utama untuk pendapatan daerahnya perlu memperhatikan kesejahteraan petani dengan melihat tingkat daya beli petani, serta untuk melihat keberhasilan pembangunan sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat perlu dilihat kesejahteraan masyarakatnya terkhusus petani, sehingga penelitian ini menggunakan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) untuk melihat perkembangan dan tingkat daya beli petani di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan uraian permasalahan, maka disusun pertanyaan penelitian untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan nilai tukar petani pada petani pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Provinsi Sumatera Barat?

2. Bagaimana perbandingan nilai tukar petani antara petani pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Provinsi Sumatera Barat?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Sumatera Barat”**.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan nilai tukar petani pada pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Menganalisis perbandingan nilai tukar petani antara petani pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi referensi dalam merumuskan dan mempertimbangkan kebijakan baru terutama terkait nilai tukar petani.
2. Bagi penulis dapat memperluas pengetahuan tentang nilai tukar petani di Provinsi Sumatera Barat dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
3. Bagi pembaca dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi untuk penelitian dengan topik yang serupa.

